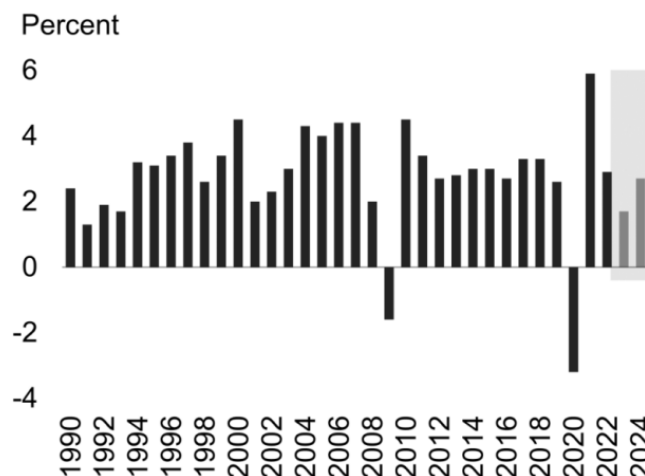


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi perekonomian global saat ini sedang bergejolak sebagai imbas dari pasca pandemi Covid-19, perjuangan melawan inflasi ditambah konflik Rusia di Ukraina yang membebani aktivitas. Bank sentral di berbagai dunia meningkatkan peredaran uang dan menaikkan suku bunganya demi menjaga perekonomian negaranya masing-masing. Pada akhir tahun 2022 IMF (*International Monetary Funding*) memproyeksikan bahwa inflasi global pada tahun 2023 akan mencapai 6,6%. Bank dunia melaporkan telah terjadi penurunan pertumbuhan global sebesar 1,3% di awal tahun 2023, dampak dari pengetatan kebijakan moneter yang agresif untuk mengendalikan inflasi, memburuknya kondisi keuangan, menurunnya kepercayaan, dan meluasnya kekurangan energi. Berikut grafik prospek pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product) global, dikutip dari Blog Bank Dunia, Januari 2023 :



Gambar 1. 1 Tingkat Pertumbuhan GDP Dunia 2010-2019

Dihitung Menggunakan Bobot PDB USD Riil Pada Harga Rata-Rata Tahun 2010-2019 dan Nilai Tukar Pasar. Sampel Mencakup 37 Negara Maju dan 144 Negara Berkembang. *Sumber: (World Bank, 2023)*

Gambar 1.1 diatas, menyatakan bahwa pertumbuhan global telah melambat dari 2,9% dari tahun 2022 menjadi 1,7% pada tahun 2023, padahal pada tahun 2022 proyeksi perlambatan adalah sebesar 2,7%. Prospek tersebut memiliki beberapa risiko penurunan, termasuk kemungkinan inflasi yang lebih tinggi,

kebijakan moneter yang lebih ketat, tekanan keuangan, dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Laju pertumbuhan ini akan menjadi yang terlemah ketiga di hampir tiga dekade, dibayangi oleh resesi global yang disebabkan oleh pandemi pada tahun 2020 dan krisis keuangan global pada tahun 2009. Garis menunjukkan median grup inflasi tahun-ke-tahun untuk 81 negara, 31 di antaranya adalah ekonomi maju dan 50 adalah negara berkembang (World Bank, 2023)

Pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat mengurangi minat investor. Inflasi tinggi di negara-negara tujuan ekspor juga memicu penurunan dan pembatasan order kepada negara importir. Ketika ada ancaman resesi, inflasi naik, suku bunga naik, konsumen juga akan mengurangi daya beli. Akibatnya, terjadi penurunan kapasitas produksi sehingga kemudian berimbas pada timbulnya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan jumlah tenaga kerja ter-PHK sampai Desember 2022 sebanyak 25.114 orang. (Kemenaker, 2022)

Merespon tantangan yang terutama datang dari eksternal atau global, UMKM (Unit Mikro Kecil Menengah) akan jauh dari episentrum permasalahan ini. Ekonomi Indonesia pada 2022 tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya, yakni sebesar 3,70%. Penggerak utama dari aktivitas ekonomi nasional ini adalah dari golongan UMKM. UMKM memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia karena berkontribusi dalam pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) dan penyerapan tenaga kerja (Bank Indonesia, 2022)

UMKM merupakan sektor yang paling peka terhadap lapangan pekerjaan, karena rata-rata tidak memerlukan strata pendidikan yang tinggi dan skill tertentu serta mudah dijangkau masyarakat. UMKM juga memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian bahkan disaat krisis. Proporsi serapan tenaga kerja UMKM Indonesia merupakan yang paling besar di ASEAN. Pada tahun 2021 UMKM Indonesia tercatat mampu menyerap 97% tenaga kerja, menyumbang 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta berkontribusi 15,6% terhadap ekspor nasional7%. (Kemenkopukm, 2021)

Banyak pemilik dan pengelola UMKM tidak memiliki kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk efektif mengelola data keuangan mereka, sehingga mempengaruhi kinerja bisnis mereka. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah besar pelaku UMKM cenderung mengabaikan aspek-aspek kompleks seperti akuntansi dan manajemen keuangan. Banyak di antara mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai kondisi keuangan usahanya secara menyeluruh, termasuk kurangnya kontrol terhadap jumlah kas yang tersedia, besaran modal yang telah diinvestasikan, nilai utang dan piutang, serta ketidakjelasan mengenai apakah usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. (Afriyadi, 2023).

Keterbatasan kemampuan UMKM untuk menghasilkan laporan keuangan kredibel yang merupakan bahan pertimbangan krusial bagi lembaga keuangan menilai kelayakan kredit menjadi penghambat pertumbuhan UMKM. Menurut Berlian Afriansyah, dkk (2021) Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM berdasarkan SAK-EMKM terhadap 40 UMKM, menghasilkan kesimpulan bahwa penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan SAK-EMKM. Lebih lanjut, Hardi Bahar (2019) Analisis Kemampuan Intelektual Menyusun Laporan Keuangan Terhadap Daya Saing Bagi UMKM Di Kota Batam Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean diketahui bahwa kemampuan intelektual menyusun laporan keuangan yang telah diimplementasikan oleh pelaku usaha masih lemah secara keseluruhan mencapai 8% (Hardi, 2019)

Menjadi nilai kearifan budaya di Indonesia, bahwa setiap masing-masing daerah memiliki kuliner yang khas. Kekhasan ini memiliki kekuatan branding tersendiri karena mengangkat nama suatu daerah. Subsektor kuliner menyumbang 41% dari total kontribusi sektor ekonomi kreatif merupakan sumbangsi terbesar diantara subsektor lainnya terhadap PDB nasional (Kemenparekraf, 2022) UMKM Seblak Mewek Jambi merupakan salah satu UMKM yang bergerak pada sektor kuliner di Kabupaten Muaro Jambi, yang mengangkat kuliner autentik masyarakat Sunda, yaitu Seblak. Kuliner khas Indonesia ini telah menunjukkan tanda-tanda pergeseran dari sekedar makanan trend menjadi makanan yang dibudidayakan oleh masyarakat sekitar keberadaannya, sehingga bukan hanya menjadi makanan

musiman. Sejak berdiri pada tahun 2020, Seblak Mewek Jambi berkembang pesat dari berwujud lapak kontainer, menjadi outlet, hingga sekarang telah memiliki cabang .

Prospek yang sangat baik ini sebaiknya harus diiringi dengan tata kelola keuangan yang memadai sebagai acuan rencana strategisnya. Upaya-upaya konkret dalam memberdayakan UMKM merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam regulasi tersebut, UMKM diposisikan sebagai sektor strategis yang menjadi penggerak utama perekonomian berbasis kerakyatan. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM secara menyeluruh dan berkelanjutan menjadi hal yang sangat krusial.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Bank Indonesia turut mengambil peran aktif melalui pelaksanaan program pengembangan UMKM yang berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, efisiensi biaya, serta perluasan akses pasar. Salah satu bentuk implementasi dari program pengembangan UMKM berbasis tiga pilar adalah digitalisasi UMKM, yang bertujuan untuk mempercepat transformasi digital sektor ini di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi. Digitalisasi UMKM mencakup berbagai inisiatif, antara lain *e-Farming*, yang mengintegrasikan teknologi digital dalam praktik pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi; *e-Commerce*, yang bertujuan memperkuat kapasitas pemasaran digital serta mendorong penetrasi produk UMKM ke pasar global melalui platform daring; serta *e-Financing*, yang diwujudkan melalui pemanfaatan aplikasi digital seperti SI APIK guna mempermudah pencatatan keuangan UMKM. Selain itu, penggunaan sarana pembayaran digital seperti QRIS UMKM turut dioptimalkan untuk mendukung kemudahan dan efisiensi transaksi keuangan (Bank Indonesia, 2022).

SI APIK (Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) merupakan aplikasi hasil kolaborasi Bank Indonesia bersama IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Aplikasi ini menggunakan dasar SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah) yang telah disetarakan dengan kebutuhan UMKM. Produk anak bangsa ini telah dirilis sejak tahun 2017 lalu. Hasil penelitian mengenai penerapan aplikasi akuntansi berbasis Android SI APIK (Studi pada UMK Kerupuk Ikan Surabaya) menunjukkan bahwa aplikasi tersebut

mampu memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan yang relevan dengan aktivitas operasional pelaku usaha. SI APIK memfasilitasi pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan secara mudah, sederhana, dan efisien, sehingga dapat diakses dan digunakan oleh pelaku UMK tanpa memerlukan kompetensi akuntansi yang tinggi. (Dini Nikmatul Larasati, 2022)

Lebih lanjut, implementasi SI APIK juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan sistem informasi akuntansi yang memadai di lingkungan usaha mikro, memperbaiki kelemahan sistem pencatatan keuangan konvensional yang sebelumnya digunakan, dengan menyediakan solusi digital yang lebih terstruktur, akurat, dan dapat diandalkan dalam mendukung pengambilan keputusan keuangan perusahaan. (Zahro, 2019) Aplikasi yang digadang-gadang Bank Indonesia dapat mengangkat nilai UMKM tersebut pada kenyataannya hingga saat ini dapat dikatakan belum membumi di kalangan pengusaha kecil. Dapat dilihat dari data jumlah pengguna dan rating beberapa aplikasi keuangan UMKM di Toko Aplikasi Android berikut;

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pengunduh dan Rating Aplikasi Keuangan UMKM di Toko Aplikasi Android

No	Nama Aplikasi	Jumlah Pengunduh	Rating (1-5)
1	SI APIK	>1000	4,3
2	Lamikro	>10000	4,3
3	Buku Kas	>185000	4,6
4	Buku Warung	>265000	4,8

Sumber (data diolah) : *Android Playstore* Juni 2023 (data diolah)

SI APIK memiliki jumlah pengunduh paling kecil dibandingkan aplikasi sejenis lainnya dilihat dari Tabel 1.1 diatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana penerimaan pengguna terhadap aplikasi, kendala penggunaan serta bagaimana implementasi aplikasi SI APIK dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis pada UMKM. Penelitian ini akan menginvestigasi manfaat dan tantangan implementasi aplikasi akuntansi di UMKM, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi akuntansi di antara UMKM. **“IMPLEMENTASI APLIKASI SI APIK DALAM Mendukung Pengambilan Keputusan Bisnis Ditinjau dari Persepsi Pengguna”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pencatatan keuangan yang telah berjalan pada UMKM?
2. Bagaimana persepsi pengguna terhadap implementasi SIAPIK berdasarkan Teori TAM (*Technology Acceptance Model*) ?
3. Bagaimana implementasi SIAPIK dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis UMKM ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui bagaimana prosedur pencatatan keuangan yang telah dijalankan oleh UMKM.
2. Menganalisis persepsi pengguna terhadap implementasi SIAPIK berdasarkan dimensi-dimensi *Technology Acceptance Model* (TAM)
3. Menganalisis bagaimana implementasi SIAPIK dapat memberikan kontribusi dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis UMKM

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk riset dan pengembangan topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi yang diterima aplikasi SIAPIK guna sebagai bahan kajian evaluasi sistem, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi kepada pelaporan keuangan UMKM.